

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	NERACA	10	31 - 8 - 2002

## ■ Pertambangan

## Pemerintah Bentuk Tim *Due Diligence* untuk KPC

### Jakarta, NERACA

Pemerintah telah membentuk tim *due diligence* (pengkajian menyeluruh) guna menentukan ke-laihan para investor yang akan membeli saham dalam program divestasi 51% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC).

"Tim *due diligence* ini sudah dibentuk dan disahkan oleh Menko Perekonomian. Jadi, *due diligence* ini sudah bisa berjalan mulai sekarang," kata Sekjen Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Djoko Darmono di Jakarta, Jumat (30/8).

Tim *due diligence* itu, diketuai pejabat kementerian perekonomian. Sementara wakil tim itu dari DESDM, sedangkan anggotanya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur, dan penasehat pemerintah di bidang keuangan.

Diakui, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur belum memberikan konfirmasinya untuk duduk sebagai salah satu anggota tim *due diligence* ini. "Karena mereka tidak pernah datang kalau diajak rapat. Namun kita pastikan bahwa tim *due diligence* ini harus jalan terus, karena divestasi 51%

saham KPC harus tuntas tahun ini," kata Djoko dikutip *Lippostar*.

Sementara itu, menjawab tentang desakan Pemkab Kutai Timur dan Pemprov Kaltim agar dibentuk konsorsium untuk menghimpun investor yang akan membeli KPC, Djoko menyatakan pemerintah tidak berminat untuk membentuk konsorsium itu.

"Konsorsium tidak bisa dipaksakan, pemerintah tidak bisa mendesain konsorsium. Kalau akan terjadi konsorsium biarlah berjalan secara alamiah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak usah mendesainnya. Jadi, tidak dibikin oleh pemerintah," katanya.

Demikian juga terhadap permintaan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur, yang menginginkan bagian saham daerah lebih besar dari yang sudah diputuskan pemerintah, yakni 31% untuk Pemerintah Daerah dan 20% untuk Pemerintah Pusat, dia menyatakan soal itu sudah final.

"Kita harus hargai keputusan yang telah dibuat pemerintah, yakni 31% saham untuk pemerintah daerah dan 20% saham untuk pusat, saya kira itu adil," katanya.

Dalam kesempatan itu, Djoko

juga membatah tuduhan sejumlah pejabat Pemkab Kutai Timur dan Pemprov Kaltim, yang menyatakan sejumlah pejabat DESDM memiliki agenda sendiri dalam kasus divestasi 51% saham KPC.

"Saya yakin seyakini-yakinnya, tidak ada itu. Kita bermain dalam koridor pemerintah. Dari menteri sampai bawah tidak ada yang bermain," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemda Kalimantan Timur (Kaltim) — baik Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten Kutai Timur, dan calon mitra bisnisnya — belum akan merespons permintaan DESDM untuk melakukan *due diligence* dalam kaitan untuk membeli saham divestasi PT Kaltim Prima Coal (KPC). Pasalnya, selain masalah *due diligence* tidak diatur dalam Perjanjian Kontrak Pengusahaan Pertambangan Batu-bara (PKP2B), juga permintaan ini dinilai tidak lazim karena penilaian itu dilakukan terhadap diri sendiri.

"Bagaimana mungkin penilaian bisa berlangsung obyektif jika kita yang melakukan sendiri penilaian itu. Saya kira ini tidak masuk di akal dan terlampau mengada-ada. Logikanya, kalau kita mau obyektif

untuk menilai diri kita sendiri pihak lainlah yang melakukannya bukan kita," kata Sekretaris Pemd Provinsi Kaltim, Syaiful Teteng menjawab pertanyaan *Neraca*, saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta belum lama ini. Dia bersama sejumlah pejabat Pemda Provinsi dan DPRD Provinsi Kaltim, tengah melakukan rapat, dan kabarnya akan melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat pemerintah dan DPR.

Menurut Teteng, pihaknya justru akan mengusulkan kepada pemerintah c.q. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Pemda Kaltim diizinkan terlebih dulu melakukan *due diligence* terhadap "isi perundang-undangan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Pasalnya, sebagai calon pembeli Pemda jelas memperoleh jata kuota walaupun masih harus digosiasikan.

"Ibarat Anda membeli sebuah mobil, masa yang *due diligence* kita sebagai pembeli. Keliru dong! Seharusnya kitalah sebagai pembeli yang melakukan *due diligence* kepada penjual untuk melihat apakah *spec* mobil yang ditawarkan itu sesuai dengan yang dipromosikan atau tidak," katanya. (2)

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	MEDIA IND.	2	31 - 0 - 2002

# Pemerintah Bentuk Tim Uji Tuntas KPC

**JAKARTA (Media): Pemerintah membentuk tim *due diligence* untuk menentukan kelayakan para investor yang akan membeli saham dalam program divestasi 51% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC). Tim uji tuntas itu sudah dibentuk dan disahkan Menko Perekonomian, Kamis (29/8).**

"Jadi proses *due diligence* sudah bisa berjalan mulai sekarang," ungkap Sekjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Darmo, di Jakarta, kemarin.

Tim *due diligence* diketuai pejabat Kementerian Perekonomian, sementara wakilnya dari Departemen ESDM. Anggotanya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur, dan penasihat pemerintah di bidang keuangan.

Tetapi, menurut Djoko, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur hingga hari ini belum memberikan konfirmasi untuk duduk sebagai salah satu anggota tim uji tuntas tersebut. Meski tim dari daerah tidak pernah datang meski sudah diundang, dia memastikan proses pengujian terhadap para peminat 51% saham KPC tersebut harus jalan terus. Karena menurut dia, proses divestasi saham yang sudah tertunda sejak 1996 itu harus selesai tahun ini.

Soal desakan Pemkab Kutai Timur dan Pemprov Kaltim agar dibentuk konsorsium untuk menghimpun investor yang akan membeli saham KPC itu, Djoko menyatakan pemerintah tidak berminat membentuk atau mendesain konsorsium itu. Menurut dia, konsorsium seperti yang diinginkan pihak daerah itu tidak bisa dipaksakan karena pemerintah tidak bisa mendesain konsorsium. "Kalau akan terjadi konsorsium, biarlah berjalan alamiah. Pemerintah pusat maupun daerah tidak usah mendesainnya."

Djoko juga menegaskan putusan pemerintah pusat yang membagi 51% (jika proses divestasi selesai)—untuk daerah 31% dan pusat 20%—merupakan keputusan final dan tidak bisa ditawar lagi. Menurut dia, itu sudah putusan yang adil, dan karenanya harus dihargai.

Dalam kesempatan itu, Djoko juga membatah tuduhan sejumlah pejabat Pemkab Kutai Timur dan Pemprov Kaltim yang menyatakan pejabat DESDM memiliki agenda sendiri dalam kasus divestasi 51 saham KPC itu.

### Kemenangan Merah Putih

Kepada *Media* yang menghugungnya kemarin malam, Bupati Kutai Timur Awang Faroek Ishak mengaku memang tidak berminat menghadiri undangan pembentukan tim *due diligence* itu. Karena, dalam penilaiannya, pembentukan tim yang melibatkan aparat birokrat atau tim lintas sektoral tidak sesuai dengan semangat transparansi.

"Kami menginginkan yang terlibat dalam tim uji tuntas penawar saham itu dari kalangan profesional dan netral. Kalau birokrasi yang mengurus soal itu, bisa tidak kena sasaran dalam upaya mencari pembeli yang sesuai dengan harapan kita bersama," katanya.

Soal siapa saja anggota tim *due diligence* itu, menurut Awang, bisa dicari bersama-sama oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Kalau perlu ketiga pihak tersebut sama-sama menanggung biayanya demi memperoleh penawar berkualitas dan memiliki dana yang cukup untuk

meneruskan operasional KPC tersebut.

Awang kembali menyatakan keheranannya terhadap keengganan pemerintah pusat terhadap pembentukan konsorsium pusat-provinsi-kabupaten itu. Dengan konsorsium seperti itu, kata dia, yang penting proses divestasi 51% saham KPC itu selesai, dan kemenangan ada pada 'Merah Putih'.

"Yang penting kan proses divestasinya selesai dan saham mayoritas dipegang pihak Indonesia, 'Merah Putih'. Daerah Kutai Timur dan Kalimantan Timur juga kan bagian dari Indonesia, kenapa pusat mesti keberatan dengan konsorsium," kata bekas Ketua Komisi II DPR itu.

Lagi pula, menurut Awang, kalau sudah mayoritas setidaknya pihak Indonesia, atau Merah Putih bisa mengontrol operasional KPC. Kontrol tersebut diperlukan karena sejauh ini dia merasa KPC belum berbuat banyak untuk daerah. Gelombang dolar di pertambangan batu bara yang terletak di Sangatta, Kutai Timur itu, kata dia, hanya dinikmati pemilik saham mayoritas (Rio Tinto dan British Petroleum), dan karyawan.

Dalam laporan penelitian Analisis Dampak Ekonomi KPC yang dikerjakan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia disebutkan, KPC dan kegiatan pertambangan batu bara lainnya memberikan kontribusi tidak kurang dari 70% dari total PDRB Kutai Timur. (Lihat tabel).

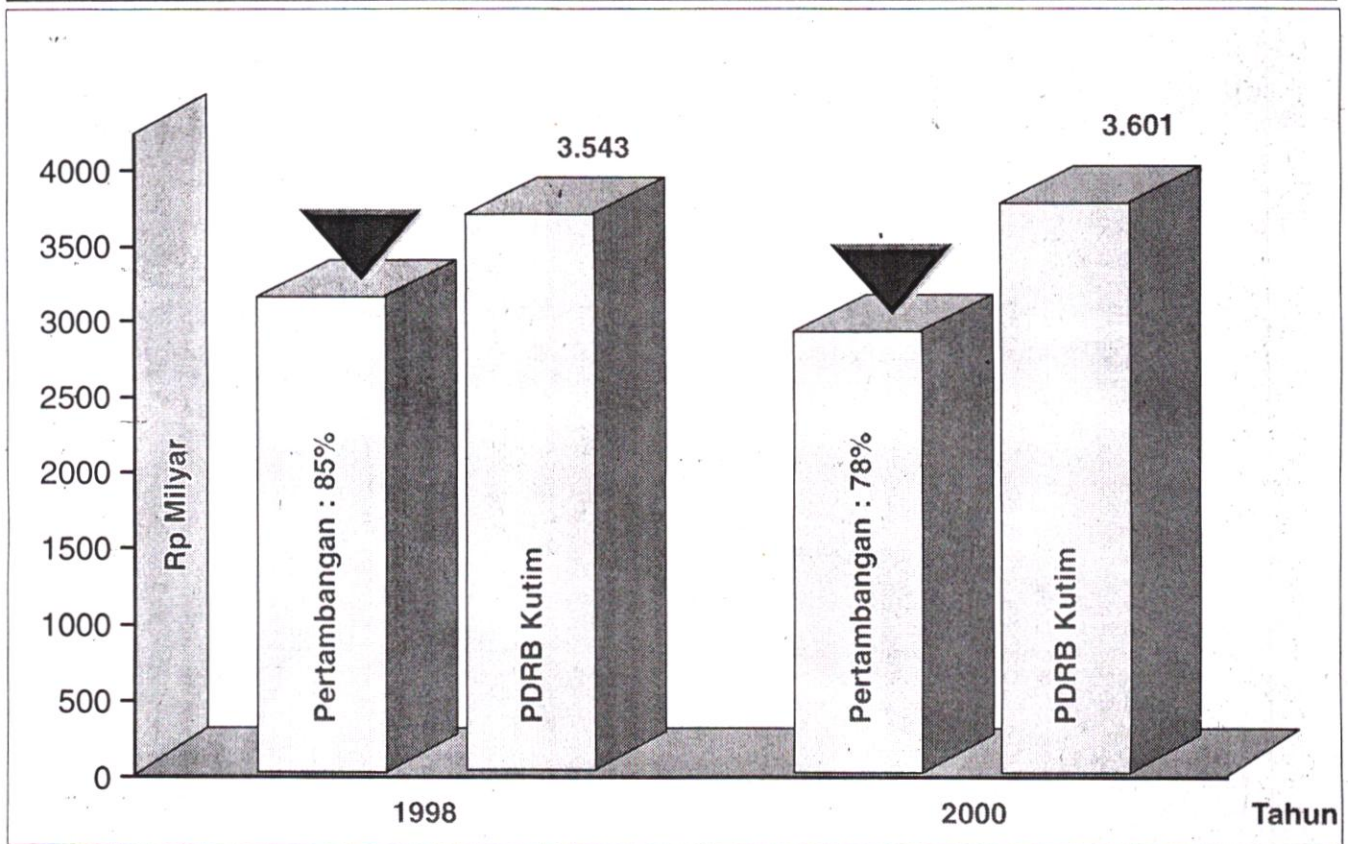
Apa pun, Awang menyebutkan meski menguasai saham mayoritas kelak, pihaknya tetap akan mengedepankan profesionalisme. Menurut dia, siapa pun, kalau memang berkualitas akan tetap dipertahankan dalam pengelolaan manajemen sehari-hari.

(Why/Naz/E-2)

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

## Kontribusi Pertambangan terhadap PDRB Kutim



## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	NERACA	10	31 - 8 - 2002

Pertambangan

# Ginandjar Membantah Telah Berikan Persetujuan atas TAC Ustraindo

Jakarta, NERACA

Menteri Pertambangan dan energi periode 1988-1993, Ginandjar Kartasasmita membantah AC (*Technical Assistance Contract*) PT Ustraindo dilakukan atas persetujuan dirinya. "Yang benar adalah persetujuannya dilakukan oleh Pertamina. Dan sebagai tambahan waktu itu, saya hanya mendapat disposisi dari presiden, bukan saya yang memutuskan," tegas Ginandjar dalam penelasannya di Jakarta, kemarin, menganggapi pemberitaan media masa yang seolah-olah kontrak TAC Ustraindo Petro Gas (UPG) hanya disetujui dirinya seperti dilansir kapuspenkum Kejaksaan Agung.

Menurut Ginandjar, apa yang disampaikan juru bicara Kejaksaan Agung itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan mantan Menesneg Moerdiono ketika bekas ekan sejawatnya itu diminta konfirmasi. "Saya mencek kepada Pak Moerdiono apakah beliau mengungkapkan hal itu, ternyata awabannya tidak," kata Ginandjar.

Dia menambahkan, kepada dirinya Moerdiono mengatakan bahwa semua pernyataannya itu teracak dalam berita acara pemeriksaan (BAP). "Makanya, saya kaget kok Kapuspenkum Kejaksaan Agung menginformasikan hal lain," katanya.

Menurut Ginandjar, dirinya bukan membela diri tentang peran DKPP (Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina) yang disebut-sebut tidak memberi persetujuan atas kontrak TAC antara Pertamina dengan PT UPG. Dia menilai ada hal-hal yang tidak dipahami mengenai implementasi UU No. 8/1971 tentang Pertamina.

Mantan Menko Ekuin ini menambahkan, ketentuan Pasal 17 UU No. 8/1971 soal DKPP yang beranggotakan menteri keuangan, menteri sekretaris negara, menteri negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ketua Bappenas, serta menteri pertambangan dan energi menyangkut masalah kebijakan sepihak adalah tidak benar.

Menurut Ginandjar, dalam pasal tersebut rapat DKPP hanya bisa diselenggarakan satu kali dalam setahun. Itu pun, lanjutnya, hanya untuk membahas laporan tahunan direksi.

Sementara persetujuan kerjasama dengan pihak swasta dalam

rangka *Production Sharing Contract* (PSC), *Joint Operating Body* (JOB), atau TAC yang jumlahnya puluhan sejak UU ini ada, tidak dibahas dalam rapat DKPP tersebut. "Demikian pula dengan TAC dan PT Ustraindo ini, semula memang ada rencana untuk mengadakan rapat DKPP karena ada penempatan dana Rp 5 miliar. Namun, rencana tersebut dibatalkan dan Pertamina menangani rencana tersebut seperti halnya kerjasama yang lain," tuturnya.

DKPP sejak awal sudah mengetahui kontrak TAC karena diberi tahu oleh presiden, yang saat itu dijabat oleh Soeharto. "Persetujuannya adalah Pertamina, sebagai mentamben saya hanya mendapat disposisi dari presiden dan bukan saya yang memutuskan," tegasnya lagi.

Menurut dia, kepala negara sangat menaruh perhatian dengan proyek TAC ini, karena ada format soal lapangan-lapangan yang berproduksi yang mempekerjakan ribuan karyawan yang lantas diperintahkan kepada Pertamina untuk dikerjasamakan. Sejak awal presiden memang menaruh minat yang besar pada konsep TAC ini. "Karena ingin membantu untuk meringankan beban Pertamina."

Dia menjelaskan, pertanyaan yang sebenarnya selalu ditanyakan adalah menyangkut masalah lapangan yang diberikan dalam kontrak tersebut. Menurut Ginandjar, pemberian lapangan-lapangan tersebut adalah keputusan presiden. "Alasan presiden supaya Pertamina efisien," katanya.

Seperti diketahui, dalam TAC ini kerugian negara diperkirakan mencapai US\$ 23,3 juta. Kasus ini menyeret empat orang tersangka, masing-masing Ginandjar Kartasasmita, Praptono Tjitrohupoyo, mantan direktur utama Pertamina Faisal Abda'oe, dan mantan menteri pertambangan Ida Bagus Sudjana. Faisal meninggal pada 19 Juni 2002, disusul Sudjana pada 19 Agustus 2002. Ginandjar rencananya akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus TAC pada 2 September mendatang.

### Ungkapkan Korupsi

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR yang juga anggota Pansus Pertamina DPR, Priyo Budi Santoso mengharap kasus

TAC (*Technical Assistance Contract*) Pertamina-Ustraindo dapat menjadi *entry point* bagi pengungkapan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Pertamina pada masa itu, khususnya dibagian Eksplorasi dan produksi (EP).

Menurut dia, setelah mendengar berbagai keterangan yang diberikan berbagai sumber yang diundang secara resmi oleh Pansus Pertamina, biaya produksi di empat lapangan minyak, masing-masing Bunyu, Jatibarang, Prabumulih dan Pendopo terinci atas US\$ 35/barel untuk Bunyu, US\$ 17/barel untuk Jatibarang dan Prabumulih serta US\$ 25/barel untuk Pendopo. Setelah diadakan kontrak TAC, di mana Pertamina mengalihkan semua karyawannya kepada investor di tiga lapangan minyak — tidak termasuk Jatibarang, biaya produksinya hanya US\$ 4/barel.

"Jadi yang perlu diungkap adalah kenapa biaya operasi Pertamina sangat tidak efisien, lantas kenapa setelah ada kontrak TAC di mana Pertamina mengalihkan semua karyawannya, diperoleh biaya produksi lebih murah. Pasti ini ada apa-apanya," kata Priyo.

Untuk itu, dia sangat berharap masalah inefisiensi dalam pengelolaan lapangan minyak tersebut juga menjadi perhatian dari pihak penyidik Kejagung. Kejagung juga diminta agar memanggil seluruh pejabat terkait, dan bila ditemukan ada penyalahgunaan wewenang langsung diproses sesuai hukum sampai tuntas. Sebaliknya, kata Priyo, bila tidak, sebaiknya Kejagung membersihkan nama-nama orang-orang tersebut.

Dari pantauan sementara dan keterangan dari berbagai sumber tersebut, ujar Priyo, kontrak TAC Pertamina Ustraindo sangat menguntungkan pemerintah, dalam hal ini Pertamina. Tapi, sebaiknya pihak penyidik bisa menggali lebih dalam soal tersebut, sebab dirinya tidak ingin membuat publik opini yang mengganggu tugas penyidik.

Selain itu, dia juga membenarkan bahwa mantan Menteri Pertambangan Dan Energi (1988-1993) Ginandjar Kartasasmita pernah menjelaskan soal TAC kepada Pansus.

Di Pansus, Ginandjar menjelaskan soal Perta Oil dan Pipa Tanpa Kampuh, sesuai yang dimin-

ta Pansus, tapi Ginandjar juga menjelaskan soal Balongan dan TAC Pertamina. Penjelasan sangat lengkap sekali dan sampai saat ini memang Pansus belum memberikan kesimpulan.

Ginandjar juga meluruskan pernyataan Ketua Pansus Pertamina DPR Emir Moeis yang mengatakan semua kasus KKN yang dibahas Pansus Pertamina DPR menempatkan dirinya sebagai tersangka.

"Tidak benar, bahwa saya dijadikan tersangka di semua kasus yang dibahas dalam Pansus seperti yang dituturkan Pak Emir Moeis. Bahwa saya dijadikan tersangka pada kasus TAC Pertamina-Ustraindo itu benar, karena saya dianggap terlibat dalam perubahan (amandemen) kontrak, padahal perubahan kontrak tersebut dilakukan setelah saya tidak menjabat Mentamben lagi," tegas Ginandjar.

Menurut dia, penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut tidak lebih karena alasan politis mengingat kontrak TAC tersebut sangat menguntungkan pemerintah, dalam hal ini Pertamina. Kontrak TAC pra amandemen, menurut dia, sangat menguntungkan bagi negara karena Pertamina hanya mengeluarkan biaya yang jauh lebih sedikit untuk memperoleh volume minyak yang sama, berdasarkan kontrak TAC, dibanding sebelumnya, yaitu saat masih memproduksi sendiri.

"Hal itu sudah saya jelaskan semua kepada Pansus Pertamina, sampai saya tanya apakah ada yang kurang jelas dari anggota Pansus mengenai penjelasan saya tersebut," katanya.

Ginandjar sangat kecewa terhadap pemberitaan salah satu media cetak ibu kota yang menyebut dirinya sebagai tersangka dalam semua kasus KKN Pertamina yang dilakukan tanpa melakukan *check and recheck* mengenai informasi yang telah menyudutkan dirinya tersebut.

Menurut dia, konsep kerjasama TAC dikembangkan untuk lapangan minyak yang sudah tidak berproduksi lagi atau produksinya sudah menurun dan tidak ekonomis, tetapi dengan penerapan teknologi maju masih memiliki potensi menguntungkan untuk dieksplorasi lagi. (31)

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
V	NERACA	2	31-8-2002

**PT International Nickel Tbk.** (INCO) dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) kemarin, mengangkat Peter C. Jones sebagai presiden komisaris menggantikan Scott M. Hand yang mengundurkan diri sehubungan dengan jabatan barunya sebagai chairman dan chief executive officer Inco Limited —induk perusahaan INCO—.

Selain posisi presiden komisaris, RUPSLB juga mengangkat Rumengan Musu sebagai wakil presiden komisaris dan untuk jajaran direksi diangkat James K. Gowans dan Ciho D. Bangun. (ike)

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
V	SUARA KARYA	2	31 - 8 - 2002

# RUPSLB Inco Pilih Preskom Baru

JAKARTA (Suara Karya): Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Internasional Nickel Indonesia Tbk (Inco) mengangkat Peter C Jones sebagai presiden komisaris (Preskom) dan Rumengan Musu sebagai wakil presiden komisaris. Sementara itu, James K Gowans dan Ciho D Bangun terpilih sebagai direktur Inco.

Manajemen Inco dalam keterangan pers yang diterima Suara Karya kemarin mengungkapkan bahwa Jones diangkat sebagai presiden komisaris guna mengisi jabatan yang kosong karena Scott M Hand mengundurkan diri, karena memangku jabatan baru sebagai Chairman dan Chief Executive Officer Inco Limited — induk perusahaan Inco.

Sementara itu, Rumengan Musu yang selama ini menjadi Presiden Direktur Inco hingga April 2002, memberikan jabatannya karena memasuki masa pensiun. Saat ini Musu menjabat sebagai konsultan Inco Limited.

Wakil Presiden Direktur Senior Inco, Gowans, adalah praktisi yang memiliki pengalaman di bidang pertambangan selama lebih dari 25 tahun. Terakhir Gowans bekerja di Placer Dome Inc, Kanada.

Inco adalah perusahaan publik yang tercatat di BEJ dengan kode perdagangan INCO. Pada tahun lalu saham emiten ini juga diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya (BES). Namun pertengahan tahun lalu manajemen memutuskan untuk tidak lagi terdaftar di BES karena menilai bursa itu tidak menjanjikan keuntungan.

Setidaknya dua hal menjadi alasan Inco untuk tak lagi menjadi anggota bursa Surabaya yaitu volume transaksi perdagangan saham Inco di BES cenderung mengecil sejak beberapa tahun terakhir — pada 1999 hanya 8.000 saham dan pada tahun 2000 tidak ada sama sekali. Alasan lain berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan Inco mencatatkan seluruh saham. Itu akan menaikkan biaya pencatatan yang harus dibayar Inco setiap tahun. Padahal Inco justru sedang melakukan konsolidasi guna meningkatkan kinerja keuangan. Karena itu, setelah mendapat persetujuan pemegang saham pada RUPS 5 April 2001, Inco mengirimkan permohonan *delisting* kepada BES yang kemudian disetujui.

Sementara itu, beberapa waktu lalu Inco berencana mengubah kebijakan dividen. Ini dilakukan

untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan tidak dapat membagikan dividen tahun depan. Tahun ini Inco tidak membagikan dividen untuk kinerja tahun 2001, yang berarti empat kali berturut-turut pengelola penambangan nikel ini tidak membagikan dividen setelah pembagian terakhir dilakukan tahun 1997 sebesar 0,05 dolar AS per saham.

Menurut manajemen Inco kebijakan dividen perseroan tidak berdasarkan pada besarnya laba bersih yang diperoleh. Pertimbangan pemberian dividen diberikan mengacu pada berapa besar modal yang ada dan setelah mempertimbangkan kewajiban membayar utang.

Tidak dibagikannya dividen atas kinerja tahun 2001, disebabkan penurunan yang tajam pada laba bersih. Pada tahun lalu laba bersih Inco turun menjadi 9,3 juta dolar AS dibanding periode sama tahun sebelumnya senilai 80,5 juta dolar AS. Belum lagi besar utang akibat ekspansi yang nilainya masih sebesar 346 juta dolar AS.

Utang Inco melonjak tajam sejak tahun 1999 menyusul rampungnya perluasan kapasitas hingga 150 juta pon nikel per tahun. Dengan utang

mendekati 500 juta dolar AS saat ini, kewajiban yang harus dibayar tahun lalu mencapai 77 juta dolar AS dan bunganya sekitar 28 juta dolar AS. Utang ini sendiri harus dapat dilunasi pada triwulan pertama tahun 2006.

Namun saat disinggung mengenai kinerja tahun 2002, Hodkin memperkirakan sedikit menurun dibanding tahun 2001. Produksi yang tadinya mencapai 147 juta pon hanya akan menjadi 130 juta pon. Ini terjadi menyusul adanya perbaikan salah satu tanur listrik yang akan dilakukan pada triwulan keempat 2002.

Hanya saja yang menjadi harapan besar manajemen INCO adalah terjadinya peningkatan harga nikel dunia yang akhir tahun lalu hanya 2,84 dolar AS per pon, dan sempat di bawah 2 dolar AS per pon tahun lalu. Namun pelan lalu telah mencapai 3 dolar AS per pon.

Penurunan harga ini, disebabkan oleh turunnya permintaan nikel dunia hingga 3,2 persen akibat buruknya perekonomian dunia tahun lalu. Namun dia optimis tahun ini akan terjadi peningkatan permintaan sekitar 7 persen, yang tentunya akan menaikkan harga jual di pasar dunia. (D-4)

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	BISNIS IND.	7	31-8-2

### Pertamina Jateng diserbu massa

SEMARANG (Bisnis): Ratusan massa yang bergabung dalam Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jawa Tengah ramai-ramai mendatangi kantor Pertamina UPDN IV Jateng dan DIY menuntut pejabat BUMN itu mundur, menyusul terjadinya kelangkaan BBM jenis solar yang terus berlanjut.

Massa melakukan aksi demo di kantor Pertamina UPDN IV di kawasan JL Thamrin, mereka menggelar orasi mendesak pejabat BUMN itu mundur karena diduga terlibat ikut mendalangi dalam mafia kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di wilayahnya.

Dalam orasinya kemarin, Korlap Humanika Jateng, Hendy Setyo Nugroho mendesak agar pejabat dan seluruh staf Pertamina Jateng tersebut diganti dengan segera karena diduga terlibat langsung dalam mafia kelangkaan BBM yang dikhawatirkan akan berdampak luas dan menghambat roda perekonomian di Jateng dan DIY. (rsj)

# GUNTINGAN BERITA

K	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
	BISNIS IND.	B.6	31-8-2002

## Harga timah Malaysia melemah

KUALA LUMPUR (Reuters) : Harga spot timah Malaysia turun \$20 per ton menjadi \$3.855 pada penutupan hari Kamis, mengikuti penurunan harga yang terjadi di London Metal Exchange (LME) yang tidak bergairah sejak musim panas lalu, ungkap pada pedagang.

"Tekanan jual meningkat sore ini setelah harga timah menurun di LME tadi malam. Disana tidak ada pembicaraan mengenai harga lokal Malaysia", ujar seorang pedagang di Malaysia.

Para agen mencatat penawaran sejumlah 36 ton pada saat pembukaan pasar timah di Kuala Lumpur, sedangkan penawaran berikutnya jadi berlipat dua, 85 ton.

Pada saat penutupan jumlah penawaran mencapai 80 ton, meningkat dari 69 ton pada hari Rabu ketika harga spot timah mencapai \$3.875 per ton, meningkat sekitar \$25 per ton. Para pembelinya berasal dari Eropa dan Malaysia sendiri. (\*)

24